

# **SOSIALISASI** ***E-CATALOGUE* OBAT**

Engko Sosialine M

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekes  
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes

## **UU No. 36/2009 tentang Kesehatan**

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial

## **UU No.40/2004 tentang SJSN, pasal 25 :**

Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta BMHP yang dijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **Perpres No. 111 Thn 2013 tentang Perubahan atas Perpres No 12 Thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan, pasal 32**

Pelayanan obat, alkes dan BMHP untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada **daftar dan harga obat, alkes dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.**

Pemerintah berkewajiban menjamin **ketersediaan, pemerataan** dan **keterjangkauan** obat

Pembiayaan obat merupakan bagian dari manfaat JKN dan untuk menjamin **keterjangkauan**, menggunakan daftar dan harga tertinggi obat serta BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekes sesuai dengan kebutuhan daerahnya

- Pengadaan obat berdasarkan *e-Catalogue* bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabel
- Komitmen penggunaan *e-Catalogue* akan menjamin **ketersediaan** dan **pemerataan** obat

# **Perpres 70 Thn 2012 ttg Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah**

## **Pasal 110**

- (1) Dalam rangka *E-Purchasing*, sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
- (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.
- (4) K/L/D/I melakukan *E-Purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik

# *E-Catalogue* Obat

## **Independen**

Merupakan hasil kerjasama LKPP dan Kementerian Kesehatan;

## **Nasional**

Ditayangkan secara nasional di *website* LKPP;

- **Kompetisi**
- **RKO**
- **Daftar Obat**

Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah;

## **Jaminan suplai**

Digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat oleh Satker dan Faskes.

# *e-Catalogue* Obat Tahun 2013<sup>\*)</sup>

**Daftar  
Obat**

Mencakup 326 sediaan obat generik

**Industri  
Farmasi**

29 industri farmasi yang berpartisipasi;

**Pengguna**

*e-Catalogue* telah diadopsi oleh 432  
Dinkes dan RS Pemerintah;

<sup>\*)</sup> Sejak April 2013

# *e-Catalogue* Obat Tahun 2014

## Daftar Obat

- Jumlah obat berdasarkan Formularium Nasional sebanyak 901 sediaan obat, 22 BMHP;
- Mencakup obat generik dan obat nama dagang;
- Ditayangkan secara bertahap, sejak 16 Maret 2014 telah tayang 453 sediaan

## Industri Farmasi

± 100 industri farmasi yang berpartisipasi;

## Pengguna

*e-Catalogue* akan digunakan oleh Dinkes dan Faskes

# Perangkat Regulasi Pendukung

- Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-catalogue*)
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan *e-catalogue*



Surat Edaran Menteri Kesehatan  
No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat  
Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*)

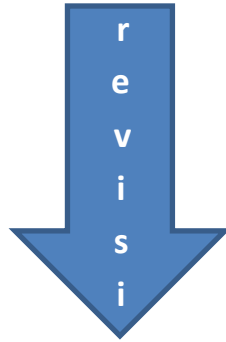
Dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yg aman, bermutu dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilaksanakan pengadaan obat secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan, baik Pusat maupun Daerah, dan Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yg bekerjasama dg BPJS, dalam pengadaan obat, baik untuk program JKN maupun program kesehatan lainnya agar:

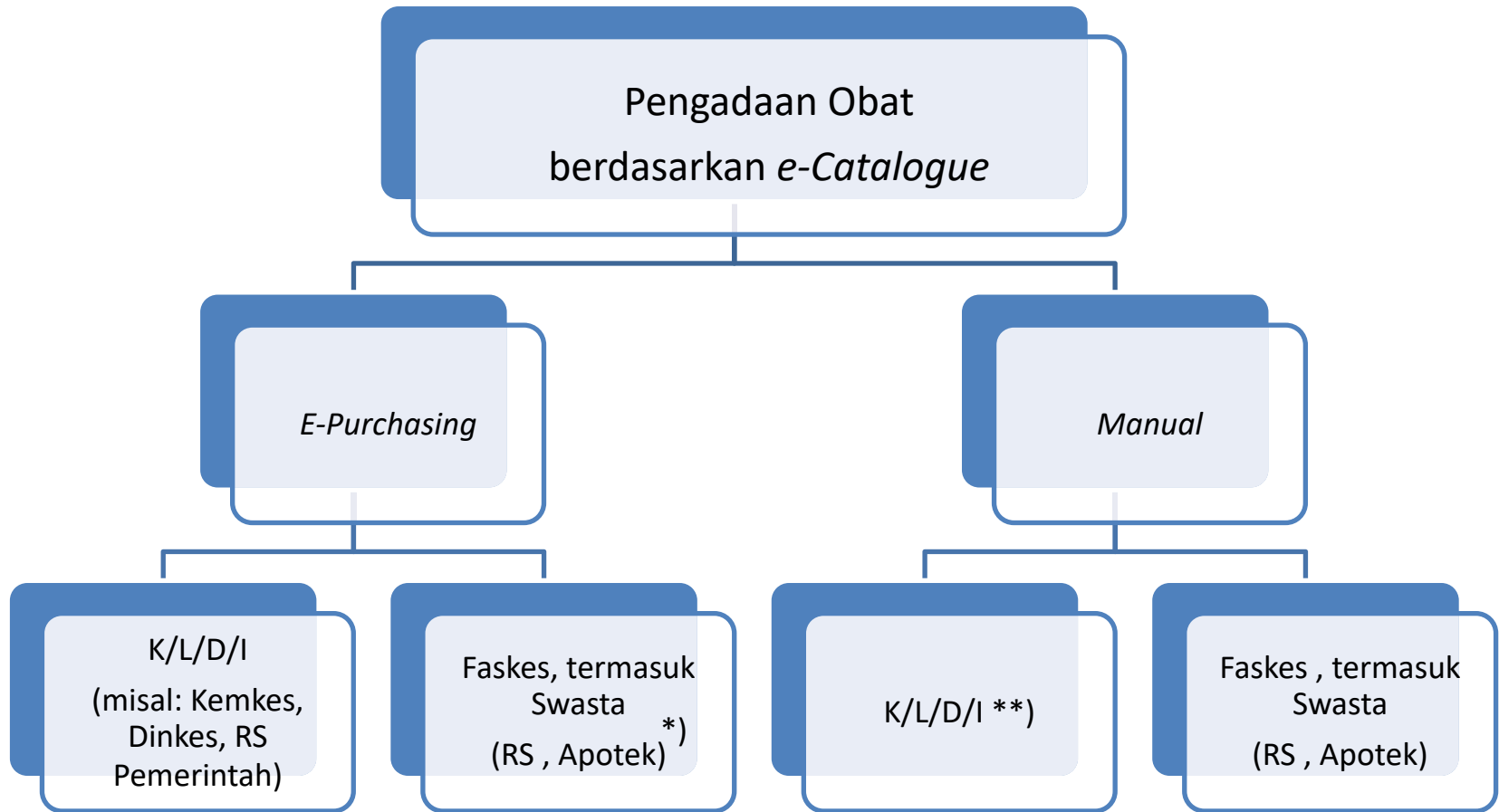
1. Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan *e-Catalogue* obat dg menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) sebagaimana tercantum dlm *e-Catalogue* Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dlm website resmi LKPP: [inaproc.lkpp.go.id](http://inaproc.lkpp.go.id)) atau pembelian secara manual

2. Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat dlm *e-Catalogue* Obat, proses pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur *e-Purchasing* berdasarkan *e-Catalogue* → **Pemanfaatan *e-catalogue* oleh Pemerintah saja**



Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan *e-catalogue* → **Pemanfaatan *e-catalogue* oleh Pemerintah dan Swasta**



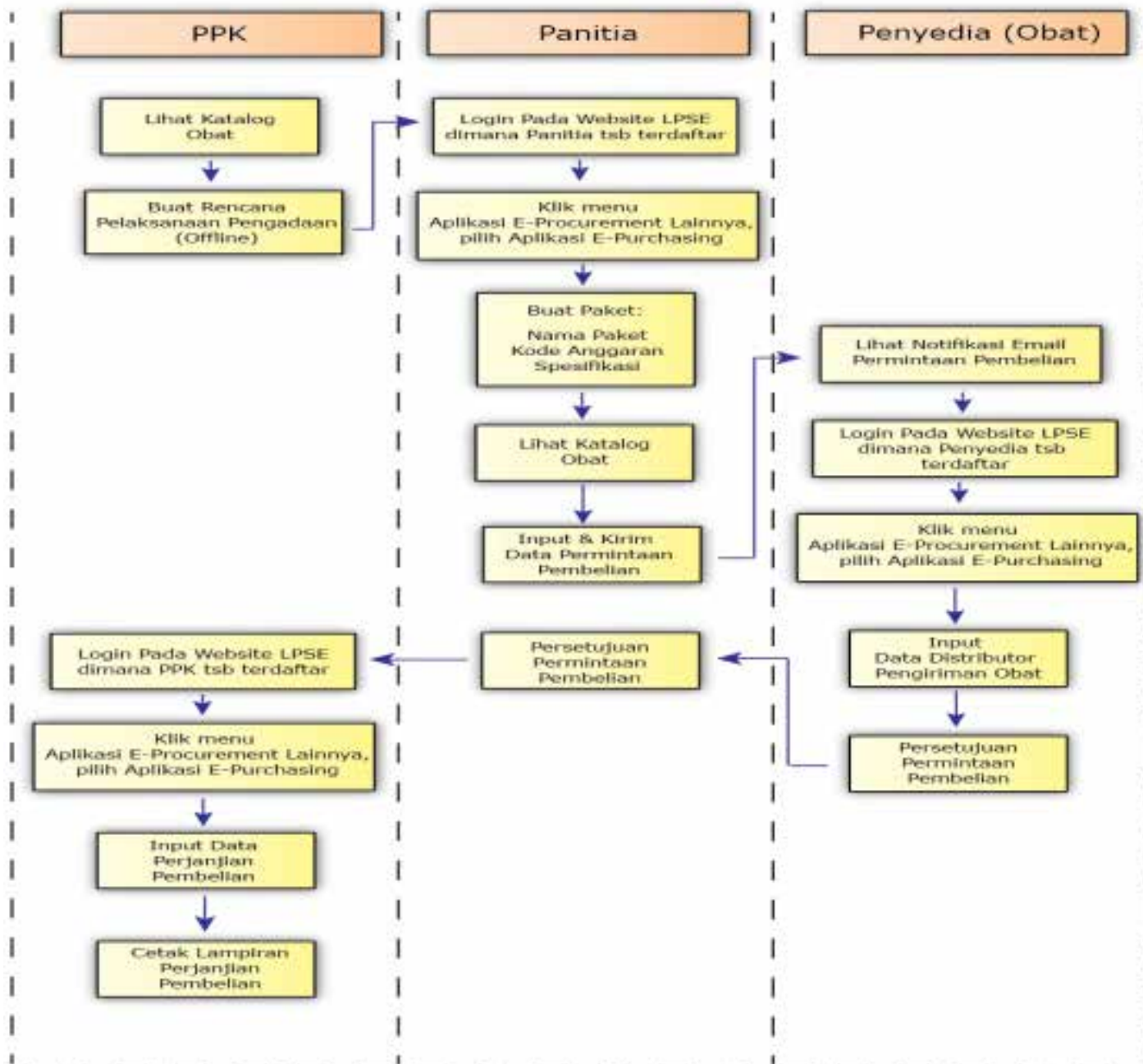
Keterangan:

\*) Pembahasan dg LKPP

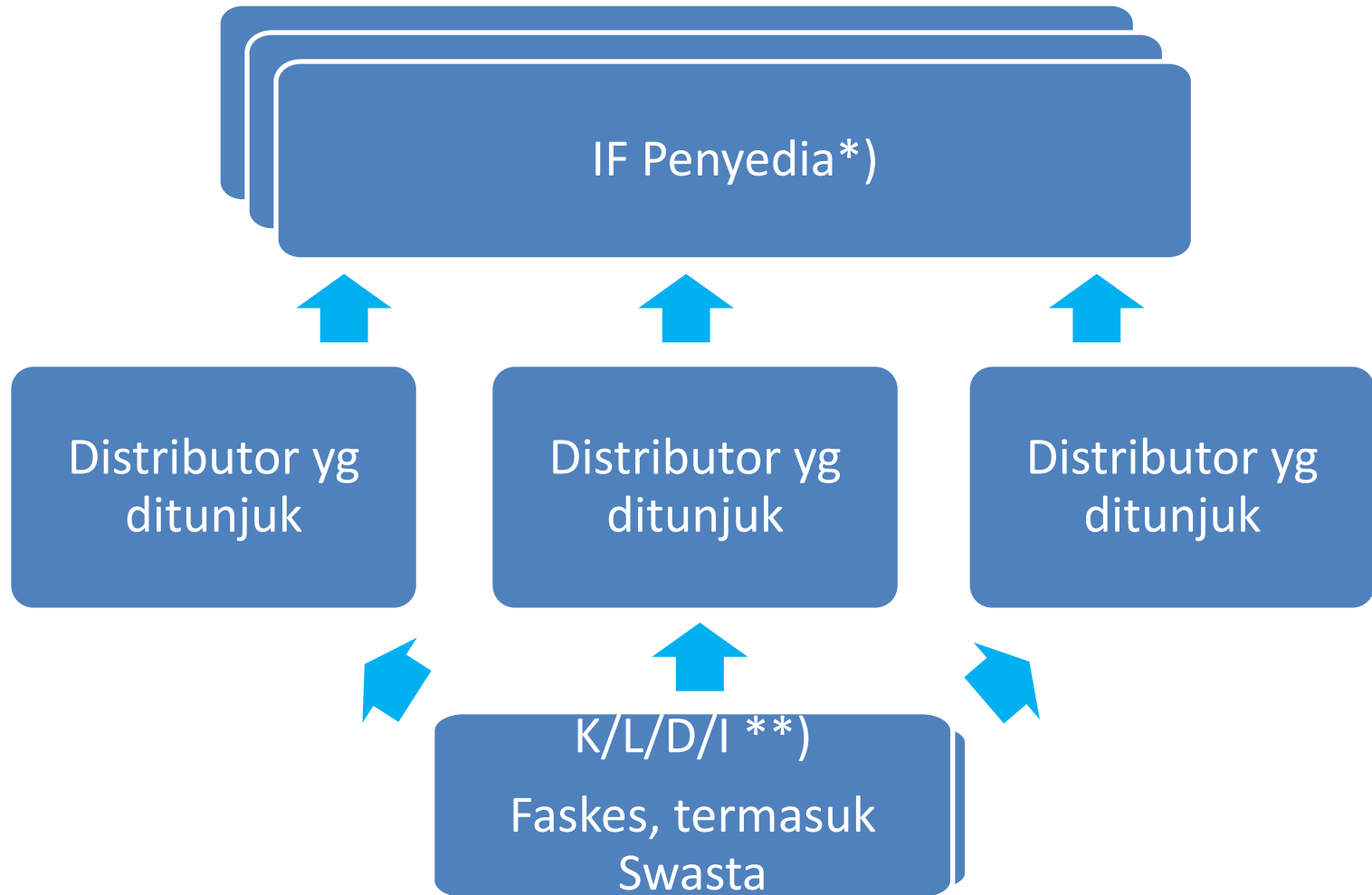
\*\*\*) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem *e-Purchasing*, butir 6:

“Dalam hal aplikasi *e-Purchasing* mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan secara *e-Purchasing* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: ...”

# Alur Proses E-Purchasing Obat



# Proses Pembelian secara Manual



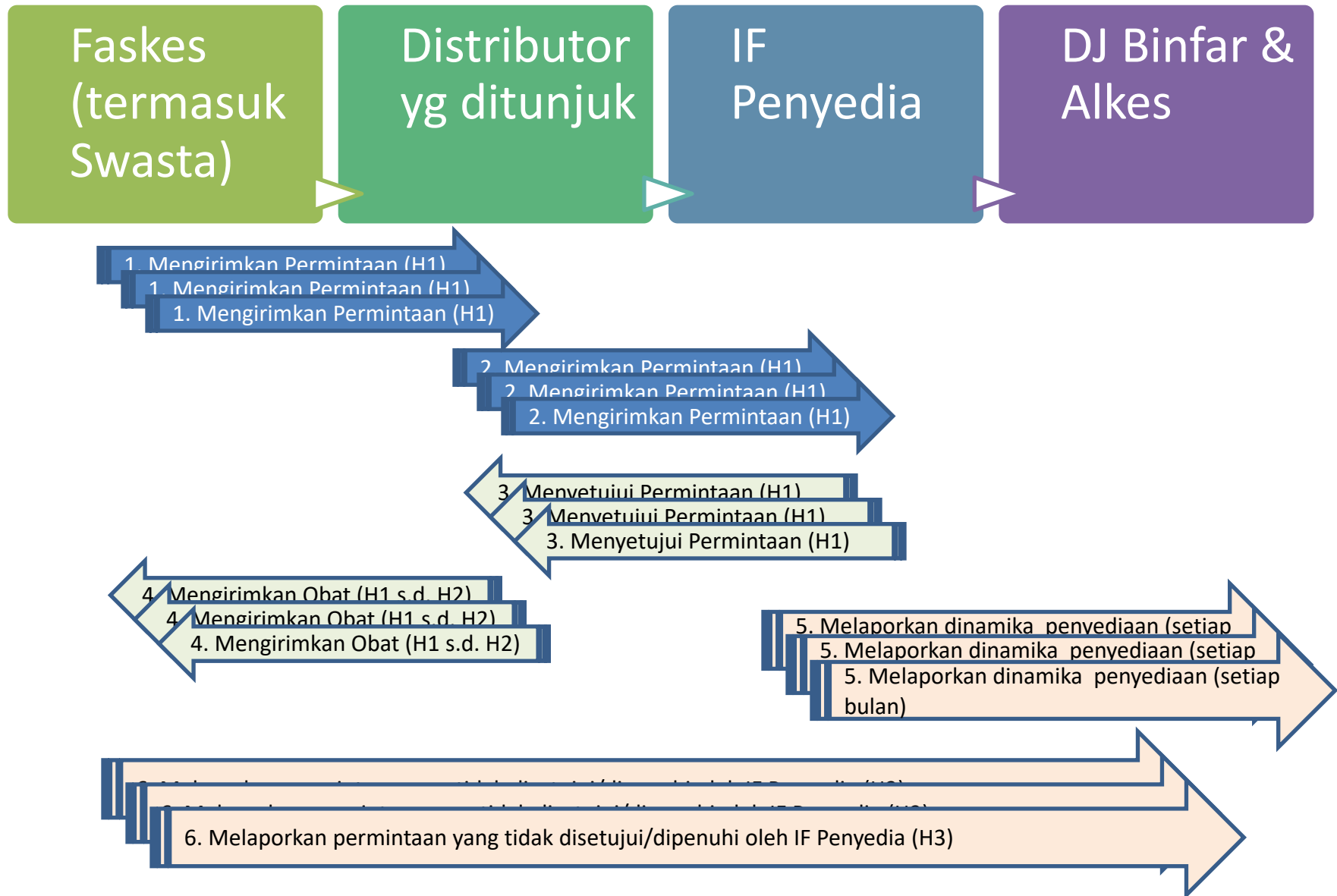
Keterangan:

\*) IF Penyedia sesuai *e-Catalogue*

\*\*\*) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

# Proses Pembelian secara Manual

## Alur Permintaan dan Pengiriman Obat





# Proses Administrasi Faskes










1. Rencana pengadaan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk untuk waktu tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun); atau
2. Kesepakatan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk, mengenai batas waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari) setelah obat diterima.

# BENTUK PERJANJIAN

Berdasarkan Perpres 70/2012:

- Untuk transaksi sd 10 juta → **bukti pembelian**
- Untuk transaksi 10 sd 50 juta → **kwitansi**
- Untuk transaksi 50 sd 200 juta → **SPK**
- Untuk transaksi lebih dari 200 juta → **dokumen kontrak**

Katalog

<b>Kesehatan</b>  <b>Obat</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	 <b>Alat Kesehatan</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	<b>Alat &amp; Mesin Pertanian</b>  <b>PP Sheet</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	 <b>Mesin Pertanian</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	<b>Sarana Bahan Pabrikasi</b>  <b>Hot-mix</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	 <b>Ready-mix</b> • Katalog Harga & Spesifikasi
<b>Kendaraan</b>  <b>Kendaraan</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	<b>Internet Service Provider</b>  <b>Internet Service Provider</b> • Katalog Harga & Spesifikasi	<b>Peralatan Berat</b>  <b>Peralatan Berat</b> • Katalog Harga & Spesifikasi			





**Katalog Obat**

Provinsi: DKI Jakarta | 
 Cari: nama Obat Generik | 
 Urut Berdasarkan: Nama Obat Generik (A-Z) | 
 Item per Halaman: 20 Item | 
 Filter Data: Reset

Halaman 1 / 17

#	Provinsi	Nama Obat Generik	Nama Dagang	Nama Penyedia	Kemasan	Harga Satuan Terkecil (Rp)	Tindakan	Kontrak Pajang
1.	DKI Jakarta	Albendazol suspensi 200 mg/5 ml		PT. Indofarma	Dus. @ 10 Botol	3,811.00	Download	Download
2.	DKI Jakarta	Albendazol tablet 400 mg		PT. Heli Pharma	ktk 5 strip x 6 tablet	365.00	Download	Download
3.	DKI Jakarta	Aloprimol tablet 100 mg		PT. Heli Pharma	ktk 10 strip x 10 tablet	195.00	Download	Download
4.	DKI Jakarta	Aloprimol tablet 300 mg		PT. Bemofarm	Kotak 30 tab 300 mg	200.00	Download	Download
5.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 0,25 mg		PT. Dexa Medica	dus 10 x 10 tablet	435.16	Download	Download
6.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 0,5 mg		PT. Dexa Medica	Kotak, 10 strip @ 10 tablet	460.00	Download	Download
7.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 1 mg		PT. Dexa Medica	dus 10 x 10 tablet	810.00	Download	Download
8.	DKI Jakarta	Ambroxol sirup 15 mg/ml		PT. Bemofarm	Botol 60 ml	2,400.00	Download	Download
9.	DKI Jakarta	Ambroxol sirup 15 mg/ml		PT. Indofarma	Botol 60 ml	2,400.00	Download	Download
10.	DKI Jakarta	Ambroxol tablet 30 mg		PT. Indofarma	Dus. 10 Blistr @ 10 Tablet	86.00	Download	Download
11.	DKI Jakarta	Ambroxol tablet 30 mg		PT. Novapharm	ktk 10 X 10 tablet	86.00	Download	Download
12.	DKI Jakarta	Aminofil injeksi 24 mg/ml		PT. Phapros, Tbk	ktk 30 ampul x 10 ml	3,240.00	Download	Download
13.	DKI Jakarta	Aminofil tablet 150 mg		PT. Erelis	botol 100 tablet	95.00	Download	Download
14.	DKI Jakarta	Aminofil tablet 200 mg		PT. Marin Lita Farmasi	Botol 100 tablet	87.15	Download	Download
15.	DKI Jakarta	Amitriptilin tablet salut 25 mg (HC)		PT. Indofarma	Dus. 10 Strip @ 10 Tablet	102.00	Download	Download

# Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan melalui *hotline service* (*e-catalogue contact centre*)

melalui :

– e-mail: [e\\_katalog@kemkes.go.id](mailto:e_katalog@kemkes.go.id)

– HP. No. 0812 8175 3081

# Penutup

**MEKANISME PENGADAAN OBAT MELALUI  
BERDASARKAN *E-CATALOGUE* BERTUJUAN AGAR  
PROSES PENGADAAN OBAT MENJADI LEBIH  
TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN**